

Negara, Masyarakat Sipil dan Agensi dalam Relasi Antarkomunal Islam

Nawari Ismail

Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Diterima redaksi 26 Februari 2014, diseleksi 8 April 2014 dan direvisi 28 April 2014

Abstract

This study is a comparative study that uses qualitative methods. Case selection was based on the following criteria: (1) an area with a plural society and with Special Islamic Splinter Groups (KISK) and non-KISK, yet was without violent intergroup conflict. The City of Yogyakarta (Ahmadiyah case) and Gowa (An-Nadzir case) was chosen for the first set of cases. (2) An area with a plural society, with KISK members and other Islamic groups, that violent conflict. The second set of cases are thus Kuningan Regency, West Java (Ahmadiyah case) and Sampang Regency, East Java (Shia case). This study uses the purposive method and involves the study of the Executive Board and members of KISK, heads of civic groups such as Islamic organizations (e.g. Local boards of Indonesian Ulama Council), consul agencies related to intercommunal relations, and local government officers. Data was collected through in-depth interviews, discussions, documentaries, and observations, as well as internet sources or websites

Keywords: *Social Structure, Social Relation, Conflict and Harmony, Agency, Civil Society, Islamic Group Splinter, Religiosentrism.*

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Penelitian dilakukan di daerah dengan kriteria: (1) struktur masyarakatnya plural dan terdapat kelompok Islam Sempalan Khusus (KISK) dan non-KISK, dan daerah yang relatif tidak terjadi konflik kekerasan antar kelompok. Untuk itu dipilih Kota Yogyakarta dalam kasus Ahmadiyah dan Kabupaten Gowa dalam kasus An-Nadzir. (2) Daerah yang memiliki struktur masyarakat plural, terdapat jamaah KISK dan kelompok Islam lainnya, namun di daerah tersebut terjadi konflik kekerasan antara KISK dengan kelompok Islam lainnya. Untuk itu dipilih Kabupaten Kuningan Jawa Barat untuk kasus Ahmadiyah, dan Sampang untuk kasus Syiah. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive*, meliputi: pengurus dan anggota KISK, pimpinan kelompok-kelompok sipil seperti Ormas Islam, termasuk MUI setempat, lembaga konsul yang terkait dengan masalah relasi intrakomunal Islam, aparat pemerintah setempat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, perbincangan, dokumenter, dan observasi, serta sumber internet atau website.

Kata Kunci: struktur sosial, relasi sosial, konflik dan harmoni, agensi, masyarakat sipil, kelompok Islam sempalan, religiosentrisme.

Pendahuluan

Era reformasi di Indonesia telah melahirkan dilema, di satu sisi ada pengakuan dan penumbuh-kembangan prinsip-prinsip masyarakat madani dan multikulturalisme, namun di sisi lain konflik-konflik horizontal bernuansa agama dan konflik vertikal antara kelompok agama dengan negara masih saja sering terjadi. Berbeda dengan awal tahun 2000-an yang ditandai dengan maraknya konflik antar umat beragama, beberapa tahun terakhir kehidupan keagamaan lebih banyak ditandai dengan konflik internal umat Islam yang melibatkan kelompok sempalan. Ketidakharmonisan dan konflik kekerasan intrakomunal Islam berkembang meluas bukan hanya di berbagai daerah di Jawa, melainkan di luar Jawa seperti antara Ahmadiyah di Kuningan, Lombok dan tempat lain, kasus Syiah di Situbondo dan Sampang, serta kasus penolakan kelompok Islam mapan terhadap keberadaan FPI di Kudus dan Kalimantan Tengah. Di pihak lain, meskipun di berbagai daerah ada kelompok sempalan (khusus) namun tidak terjadi ketidakharmonisan dan konflik.

Secara garis besar ada dua kelompok Islam yaitu kelompok arus utama (*mainstream groups*) dan kelompok sempalan (*splinter groups*). Islam arus utama/mapan (selanjutnya disingkat KIM) ditandai dengan jumlah pengikut yang banyak dan ide serta metode gerakannya sudah menjadi arus pemikiran utama umat Islam pada umumnya. Islam sempalan merupakan kelompok yang doktrin keagamaan dan atau metode gerakannya menyempal dari kelompok Islam mapan, dan biasanya bersifat minoritas. Pada saat ini kelompok Islam sempalan dapat dikategorikan ke dalam sempalan umum dan khusus. Kelompok Islam sempalan umum (KISU) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: doktrin/

worldview dan atau metode gerakannya menyempal dari kelompok Islam mapan, bisa dikenai stereotip sesat atau tidak sesat. Kelompok Islam sempalan khusus (KISK) memiliki ciri-ciri sama seperti KISU, namun doktrinnya distereotipkan sesat oleh kelompok pihak lain, baik oleh kelompok Islam mapan, sesama Islam sempalan, atau Negara.

Kelompok Islam sempalan khusus (selanjutnya disingkat KISK) yang distereotipkan negatif dapat dipilah ke dalam beberapa kelompok yaitu: (1) kelompok sesat secara formal, (2) kelompok sesat secara publik, (3) kelompok yang doktrinnya diragukan sesat-tidaknya, baik secara formal maupun publik. Kelompok sesat secara formal merupakan sebuah kelompok sempalan yang diberi 'stempel' sesat oleh pihak yang 'dianggap kompeten' yaitu melalui fatwa MUI ataupun pemerintah (Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, dan lembaga terkait lainnya). Kelompok kedua adalah kelompok sempalan yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai sesat meskipun lembaga yang dianggap berwenang belum menyatakannya. Sementara pada kelompok ketiga meskipun pihak yang dianggap berkompeten belum sampai menyatakan sesat, namun baik masyarakat maupun pihak berkompeten tersebut masih meragukan kebenaran ajarannya karena masih ada sesuatu yang misterius, karena itu kelompok sempalan ini terus berada dalam pemantauan.

Adanya stereotip sesat, baik secara formal maupun publik, dan meragukan ajaran kelompok sempalan khusus, dipandang oleh sebagian ahli sebagai variabel penyebab terjadinya konflik kekerasan terhadap kelompok sempalan. Analisis seperti ini mungkin ada benarnya, namun bisa juga menyesatkan dan akan berdampak serius terhadap pengambilan kebijakan dalam mengatasi kekerasan terhadap kelompok sempalan. Pandangan

seperti ini mungkin ada benarnya dalam kasus kekerasan terhadap kelompok sempalan di suatu daerah, namun belum tentu benar dalam kasus di daerah lain. Dalam kasus Ahmadiyah misalnya, mengapa di daerah tertentu terjadi konflik kekerasan, namun di daerah lain damai, padahal sama-sama ada jamaah Ahmadiyah yang dianggap sesat secara formal. Sementara dalam kasus LDII yang merupakan metamorfosis Islam Jamaah, yang sampai sekarang dianggap sesat secara formal tidak terjadi lagi konflik kekerasan terhadapnya. Di pihak lain kaum Syiah dan kelompok Abu Ayyub di Aceh mengalami konflik, sedangkan An-Nazir, dan lainnya tidak atau belum. Hal ini mengandaikan adanya faktor-faktor yang turut mempengaruhi bentuk relasi sosial intra komunal Islam di setiap daerah.

Pertanyaan pokoknya adalah mengapa di kalangan umat Islam di suatu daerah terjadi konflik (kekerasan), sedangkan di daerah lain damai, padahal sama-sama ada kelompok sempalannya. Dengan kata lain mengapa terjadi perbedaan dan persamaan bentuk relasi sosial (konflik atau damai) di lingkungan kelompok sempalan di lokasi yang berbeda, padahal sama-sama distereotipkan sebagai sesat dan atau diragukan baik secara formal maupun publik.

Tinjauan Pustaka

Teori Inspirator: Penelitian ini berasumsi bahwa aspek struktur dan tindakan pelaku pihak yang terlibat dalam relasi sosial berkelindan antara satu dengan yang lain. Karena itu kajian penyebab terjadinya bentuk relasi sosial tertentu dapat digunakan kedua pendekatan tersebut.

1. Masyarakat Sipil dalam Relasi Sosial

Ashutosh Varshney (2009) merupakan ahli yang berusaha

mengaitkan antara konflik dan damai dengan masyarakat sipil (*civil society*). Ia memfokuskan kajiannya pada jaringan atau ikatan interkomunal, bukan intrakomunal. Masyarakat sipil sendiri oleh Varshney dicirikan dengan kelompok yang ada di antara keluarga dan negara, ada interkoneksi antarindividu/keluarga, dan bebas dari campur tangan atau kooptasi negara. Bentuk peran masyarakat sipil dilihat pada jaringan atau ikatan yang ada dalam masyarakat.

Ia membagi jaringan atau ikatan kewargaan tersebut ke dalam 2 jenis yaitu jaringan kewargaan *asosiasional* dan *quotidian*. Ikatan asosiasional merupakan ikatan kewargaan yang berupa aktifitas warga yang terorganisir. Dalam hal ini Varshney fokus kepada asosiasi-asosiasi yang bersifat interkomunal yaitu asosiasi yang anggotanya terdiri dari komunitas agama yang berbeda (khususnya Hindu-Muslim), misalnya asosiasi bisnis, organisasi profesi, klub-klub penyalur hobi, serikat buruh, dan partai politik yang latar pengikutnya campuran. Ikatan *quotidian* berupa ikatan kewargaan dalam hidup keseharian meliputi interaksi kehidupan yang rutin seperti saling kunjung antar warga (Hindu-Muslim), makan bersama, terlibat bersama dalam acara perayaan, dan bermain bersama.

Bentuk jaringan asosiasional dari Varshney tersebut mirip dengan konsep *cross-cutting affiliation*. Dalam sosiologi biasa disebut sebagai wadah yang menjadi afiliasi dan wadah bertemunya orang-orang yang berbeda latar belakang karena adanya individu-individu yang berperan ganda di beberapa wadah.

Asumsi dan tesis yang diusung oleh Varshney adalah struktur sosial masyarakat berkorelasi dengan adanya dan intensitas konflik-damai antaragama. Menurutnya hal ini karena ada dan tingginya keterlibatan warga dalam ikatan antaragama, dan sebaliknya lemahnya

keterlibatan dalam ikatan intraagama. Dengan kata lain, jika kedua ikatan tersebut (asosiasional dan *quotidian*) kuat maka akan terwujud kedamaian. Lebih lanjut, jika dilakukan perbandingan antara kekuatan kedua ikatan tersebut, ikatan asosiasional lebih kuat daripada ikatan *quotidian*, khususnya ketika pihak-pihak tertentu (politisi) berupaya mempolarisasi komunitas agama melalui berbagai isu dan provokasi (Varshney, 2009: 3-5).

2. Agensi Pelaku dalam Relasi Sosial

Isu sentral dalam wacana teoritik tentang tindakan adalah berkisar pada kebebasan tindakan manusia dalam kaitannya dengan struktur sosial. Dalam perspektif konstruktivisme atau ideasional manusia dengan segala potensinya adalah makhluk pemikir, aktif, bebas, dan manipulatif yang mampu mempengaruhi lingkungan di luar dirinya. Dalam kaitannya dengan agama manusia menafsirkan simbol-simbol agama sesuai kepentingannya. Karena itu pula realitas itu bersifat subyektif yaitu terletak dalam ide, simbol-simbol dan makna yang dikonstruksi masing-masing kelompok agama.

Blumer menegaskan melalui konsep *self indication*-nya bahwa manusia (dalam bertindak) merupakan aktor sadar yang reflektif, ia menyatukan obyek-obyek yang diketahuinya melalui proses komunikasi yang sedang berjalan, ketika ia mengetahuinya, kemudian menilai, memberi makna dan memutuskan untuk bertindak. (Herbert, 1969: 12).

Lebih jauh Blumer mengemukakan 3 premis interaksionisme simbolik yaitu: (i) tindakan manusia dalam menghadapi sesuatu atau manusia lain tidak (hanya) sebagai respon terhadap stimulus, dengan kata lain tidak sekedar ditentukan oleh struktur atau situasi obyektif, namun berasal dari dalam diri aktor yaitu menafsirkan dan memkanai sesuatu

secara subyektif oleh aktor. (2) makna-makna adalah produk sosial yang muncul selama interaksi. Artinya, pemaknaan tersebut berasal dari interaksi seseorang dengan orang lain. Manusia belajar cara melihat dunia dari orang lain. (3) aktor-aktor sosial memberikan makna terhadap situasi, orang lain, dan sesuatu melalui proses interpretasi. (Ibid, 1969: 4-5).

Dalam konteks penelitian ini ketika melihat relasi aktor-aktor/kelompok bukan sekedar melihat tindakan mereka sebagai tanggapan langsung terhadap rangsangan dari luar. Walaupun misalnya pihak-pihak yang terlibat dalam tindakan keagamaan tersebut terlibat dalam sebuah kata, tindakan, obyek (baik obyek fisik, sosial maupun abstrak seperti peraturan di bidang keagamaan dan hak-hak sipil), situasi dan peristiwa yang sama, namun mereka (dapat) mendefinisikan dan menafsirkan secara beragam yang kemudian melahirkan tindakan sosial yang berbeda pula. Perbedaan tafsir dan pemaknaan itu dimungkinkan karena masing-masing pihak yang terlibat dalam persaingan keagamaan mempunyai pengalaman berbeda, nilai-nilai agama dan keyakinan yang berbeda. Perbedaan tindakan subyektif itu juga dapat terjadi karena adanya perbedaan status dan peranan tiap aktor, baik di lingkungan kelompoknya (agama-kepercayaan-institusi negara) maupun perbedaan status dan peran kelas sosial-ekonomi-politik dalam masyarakat setempat.

3. Posisi Agen dan Struktur

Proses adanya konflik dan damai menyiratkan adanya tarik menarik antara agensi dan struktur. Dalam kaitan ini, Bourdieu melihat individu sebagai sosok kreatif dan dalam relasi sosialnya dapat mempengaruhi dan sekaligus dipengaruhi struktur yang ada. Artinya, para pelaku, individu termasuk kelompok, adalah sosok aktif yang

bebas, meskipun mereka juga dibatasi oleh habitus-habitus lain yang menjadi struktur. (Bourdieu, 1977: 12).

Dalam konteks ini Aheam (2001) ketika melihat kaitan *habitus*-nya Bourdieu dengan agensi menyimpulkan bahwa kerangka pikir Bourdieu selain memungkinkan transformasi sosial yang berasal dari tindakan yang dilahirkan dari habitus, juga memberikan kemungkinan adanya resistensi. (Aheam, 2001: 105). Hal ini mengandaikan bahwa ekspresi kebebasan bertindak pelaku bukan hanya berupa resistensi namun juga berupa akomodasi. Simpulan seperti ini dapat difahami dari pandangannya tentang habitus yang dianggap sebagai 'kapasitas untuk melahirkan produk tanpa akhir' (*an endless to engender product*).

Menurut Aheam, konsep keagenan Bourdieu selain memberikan ruang gerak bagi tindakan agensi juga tidak menafikan struktur, sekali lagi ada relasi timbal balik antara tindakan agen dengan struktur. Hal ini menurutnya karena Bourdieu, menekankan disposisi-disposisi pelaku, dan karena habitus berada dalam lingkungan fisik dengan segala tindakan para pelaku, baik yang mewujudkan secara mental maupun fisik, sehingga habitus dapat diterapkan dalam situasi baru untuk memperkuat kondisi yang sudah ada. (Ibid, 2001: 105).

Sejalan dengan hal ini, Abu Lughad mencatat bahwa dalam struktur yang timpang secara gender, dalam peristiwa keseharian, banyak ditemukan gejala resistensi dari perempuan. Menurutnya, proses dominasi selain beroperasi melalui pengonstruksian, pembelengguan dan pemaknaan emosi individu perempuan, juga adanya resistensi sebagai hasil dari relasi kuasa antar pihak, (Abu Lughat, 1993: 89). Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa relasi kuasa dapat menghasilkan beragam bentuk dan aspek. Pandangan Abu Lughad ini sesuai dengan pandangan (sebagian) teori feminis. Dalam hal ini

Aheam mencatat bahwa dalam teori feminis, yang dinamakannya dengan pendekatan 'agensi sebagai sinonim dengan resistensi,' (*agency as a synonym for resistance*) memandang bahwa agensi merupakan sosok yang aktif walaupun berada dalam struktur sosial yang tidak setara, karena individu juga melakukan resistensi. (Aheam, 2001, :106).

Pandangan Bourdieu dan kaum feminis memiliki kemiripan dalam hal adanya persentuhan antara agen dan struktur. Pandangan seperti ini berbeda dengan pandangan yang melihat tindakan agen tidak ada kaitannya dengan struktur seperti dalam teori 'agensi sebagai sinonim dengan kebebasan' (*agency as synonym for free will*). Sependapat dengan Aheam, teori agensi yang menjadi pandangan teori tindakan (*action theory*) ini memandang bahwa agensi membutuhkan prasyarat keadaan mental dalam diri individu, misalnya niat kesadaran diri, titik pandang yang rasional, dan pengendalian niat. Teori agensi ini menafikan unsur sosial budaya yang melingkupi tindakan manusia.

Sementara itu, Foucault memandang bahwa tidak ada sesuatu yang dapat dianggap sebagai agensi. Hal ini karena kuasa itu ada di mana-mana, bukan karena ia meliputi segalanya, namun karena berasal dari mana-mana. Walaupun ia dioperasikan dengan maksud dan tujuan tertentu bukan berarti kuasa berasal dari pilihan dan keputusan individu. Dengan pandangan seperti ini, Aheam menyebutnya dengan teori *absence of agency* (ketiadaan agensi). Meskipun begitu penting dicatat bahwa pengikut Foucault, seperti O'Hara, menegaskan bahwa Foucault tidak pernah menafikan peran agensi. Hal ini setidaknya didasarkan atas pandangan Foucault bahwa kuasa bukan suatu substansi namun sebuah relasi yang dinamis sehingga memberi kemungkinan pada tindakan agensi.

Kajian Terdahulu: Kajian ini berkaitan dengan relasi antar kelompok, khususnya intrakomunal muslim. Kajian dan hasil penelitian berkaitan dengan relasi atau interaksi antarkelompok Islam sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh ahli atau peneliti. Salehuddin misalnya, memfokuskan diri kepada relasi antara kelompok Islam Tauhid, NU dan Muhammadiyah di lereng pegunungan selatan Yogyakarta (Gunung Sari). Ia menemukan, perbedaan paham agama dan posisi terhadap tradisi lokal berpengaruh terhadap interaksi sosial keagamaan masyarakat. Dua hal tersebut (paham agama dan posisi terhadap tradisi lokal) menyebabkan adanya persaingan dan terjadinya sekat-sekat interaksi atau komunikasi antarkelompok. (Salehuddin, 2007).

Sementara itu, Abidin yang meneliti relasi antar kelompok Islam di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, khususnya antara kelompok Salafi dengan kelompok Islam mapan atau *mainstream* (Abidin menyebutnya dengan non-Salafi). Relasi antara kedua kelompok (pinggiran dan mapan) berupa konflik. Konflik terjadi karena misiologi (dakwah) eksklusif kelompok Salafi yang menyalahkan kelompok lain dan kurang menghargai perbedaan pendapat. Selain juga karena faktor kebijakan politik pemerintah yang dianggap merugikan kepentingan salah satu pihak. (Abidin, 2009)

Penelitian tentang relasi antarkelompok Islam juga dilakukan Syaukani (2009) dalam kasus konflik Sunni dan Syiah di Bondowoso Jawa Timur. Secara khusus Syaukani mengkaji tentang kasus-kasus dan penyebab resistensi masyarakat (Islam Sunni) terhadap kelompok Syiah (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia atau IJABI). Ia menemukan, resistensi kelompok Islam mapan yang berbentuk tindakan kekerasan disebabkan akumulasi ketidaksenangannya terhadap kelompok

Syiah, eksklusifitas dan berkembangnya stereotip terhadap kelompok Syiah, kurangnya mediasi serta keberpihakan MUI dan Departemen Agama.

Beberapa kajian tersebut ada relevansinya dengan penelitian ini, khususnya dalam kaitannya dengan subyek penelitiannya yaitu kelompok Islam mapan dan sempalan, serta dalam aspek relasi. Meskipun begitu penelitian tersebut belum memanfaatkan isu masyarakat sipil dan tindakan keagenan pelaku dalam proses bentuk relasi intrakomunal muslim.

Penelitian Ismail (2011) tidak melihat posisi masyarakat sipil dalam kaitannya dengan konflik. Adapun penelitian ini, dengan mengadaptasi beberapa pandangan Varshney awal mengaitkannya dengan isu masyarakat sipil, selain aspek keagenan pelaku. Bedanya, Varshney mengkaji konflik antar etnik/agama dengan fokus kepada ikatan atau jaringan interkomunal (asosiasi yang menghimpun berbagai komunitas yang berbeda) di India, sementara penelitian ini mengkaji relasi sosial intern umat beragama, khususnya yang melibatkan kelompok sempalan, dan selain melihat ikatan interkomunal penelitian ini juga melihat ikatan intrakomunal dari individu-individu muslim yang berbeda paham agamanya, termasuk tindakan-tindakan yang bernilai keagenan dari pelaku. Dengan kata lain penelitian fokus kepada relasi intern umat Islam, meskipun dalam kasus Ahmadiyah sebagian umat Islam menganggapnya bukan muslim, namun secara emik mereka dianggap muslim karena mereka mengidentifikasi dirinya sebagai muslim. Selain itu Varshney nampak lebih menekankan aspek struktur daripada keagenan pelaku. Penelitian ini juga menjadikan beberapa kelompok sempalan intern umat Islam sebagai kesatuan kajian, baik yang diberi stereotip sesat maupun yang diragukan kebenaran secara formal maupun publik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Penelitian dilakukan di daerah dengan kriteria: (1) struktur masyarakatnya plural dan terdapat KISK dan non KISK, dan daerah yang relatif tidak terjadi konflik kekerasan antar kelompok. Untuk ini diambil Kota Yogyakarta dalam kasus Ahmadiyah dan Kabupaten Gowa dalam kasus An-Nadzir. (2) Daerah yang memiliki struktur masyarakat plural, terdapat jamaah KISK dan kelompok Islam lainnya, namun di daerah tersebut terjadi konflik kekerasan antara KISK dengan kelompok Islam lainnya. Untuk itu dipilih Kabupaten Kuningan Jawa Barat untuk kasus Ahmadiyah, dan Sampang untuk kasus Syiah. Penentuan informan digunakan teknik *purposive*, meliputi: pengurus dan anggota KISK, pimpinan kelompok-kelompok sipil seperti Ormas Islam, termasuk MUI setempat, lembaga konsul yang terkait dengan masalah relasi intrakomunal Islam, aparat pemerintah setempat. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, perbincangan, dokumenter, dan observasi, serta sumber internet atau website.

Untuk mencapai kredibilitas, penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu: pengoptimalan waktu penelitian, triangulasi yaitu memverifikasi, mengubah-memperluas informasi dari pelaku satu ke pelaku lain dan atau dari satu pelaku sampai 'jenuh.' Hal ini akan dilakukan dengan beberapa cara yaitu menggunakan multi metode untuk saling mendukung dalam memperoleh data, melakukan *snow-ball* dari sumber informasi satu ke satu informasi yang lain. Selain itu digunakan pengecekan oleh sejawat atau orang yang dianggap ahli dalam bidang atau fokus yang sedang diteliti, serta pembuktian terhadap data yang diperoleh dengan memanfaatkan

instrumen bantu berupa catatan lapangan (*fieldnotes*), perekam suara, dan alat foto. Analisis data dilakukan dalam dua tahap yaitu analisis ketika di dalam proses penelitian di lapangan dan analisis setelah penelitian di lapangan. Analisis ketika di lapangan dilakukan dengan induksi-analitik. Analisis setelah di lapangan dilakukan secara *thick description* dan komparatif.

Profil KISK

Profil KISK di daerah yang diteliti memiliki sejarahnya masing-masing. Ahmadiyah, baik GAI dan JAI di Yogyakarta dan Kuningan termasuk kelompok yang cukup tua, sementara Syiah di Sampang dan An-Nadzir relatif muda. Paham keagamaannya dianggap menyempal dari paham kelompok Islam umumnya, namun mengalami perlakuan yang berbeda. Selain KISK di Gowa, semuanya dianggap sesat. Perkawinan dan kegiatan keagamaan mereka bersifat eksklusif. Jamaah KISK di Yogyakarta lebih berpendidikan dibandingkan dengan jamaah KISK di Kuningan, Gowa dan apalagi dengan di Sampang. Begitu juga pekerjaan jamaah KISK di Yogyakarta lebih 'bergengsi' daripada yang di Kuningan, apalagi dengan yang di Sampang dan Gowa yang lebih banyak berprofesi sebagai petani

Struktur Sosial Masyarakat

Struktur sosial di lingkungan keempat kasus penelitian ini selain ada persamaan juga ada perbedaan. Struktur sosial yang banyak berpengaruh atau terkait dengan bentuk relasi sosial KISK dan kelompok di luar dirinya meliputi budaya lokal yang terkait dengan nilai-nilai kerukunan dan posisi tokoh dalam struktur sosial masyarakat, paham agama mayoritas yang berkembang dalam masyarakat, sejarah relasi sosial dalam

masyarakat, dan lokasi tiap kelompok agama khususnya mengenai ada tidaknya kantong-kantong komunitas, dan jaringan relasi.

Di semua daerah dan masyarakat Indonesia memiliki nilai-nilai yang mengajarkan tentang kerukunan atau harmoni di antara mereka. Nilai-nilai harmoni tersebut terus disosialisasikan antar generasi oleh elite masyarakat lokal. Budaya lokal dapat menjadi modal bagi masyarakat setempat dalam menghadapi berbagai tantangan dan isu yang cenderung mengarahkan masyarakat untuk berkonflik. Masalahnya adalah sering nilai-nilai kerukunan lokal tersebut diabaikan, sehingga terjadi ketegangan dan konflik. Di sisi lain, posisi dan peran tokoh lokal juga masih diperhatikan masyarakat setempat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa paham agama masyarakat di suatu tempat menjadi pengarah dan pengendali bagi tindakan masyarakat, khususnya bagi penganut agama dari kalangan santri. Kian taat beragama suatu masyarakat kian kuat untuk menjadikan paham agamanya sebagai acuan dalam bersikap dan bertindak. Selain itu, ada kecenderungan kuat paham agama mayoritas menjadi standar penilaian bagi paham agama kelompok lain.

Dalam aspek kesejarahan relasi menunjukkan bahwa tiap daerah sebenarnya tidak sepenuhnya steril dari konflik, walaupun masyarakat di suatu daerah itu setidaknya-tidaknya saat ini dianggap berada dalam harmoni. Perbedaannya terletak pada interval waktu terjadinya konflik awal dengan konflik susulannya; bentuk konflik yang ada, apakah dalam bentuk konflik ide, masif, dan atau kekerasan; dan perubahan bentuk relasi sosial awal (dari konflik atau integrasi) ke relasi sosial susulannya (konflik atau integrasi).

Di luar kasus KISK, hampir di semua daerah tidak ditemukan pengelompokan pemukiman penduduk atau kantong komunitas yang sangat eksklusif berdasarkan latar belakang agama atau suku dalam skala besar. Kelompok minoritas umumnya berbaur dengan pemukiman mayoritas. Memang ada beberapa rumah tangga kelompok minoritas setempat di tengah pemukiman mayoritas setempat. Sebaliknya dalam kasus warga KISK ditemukan adanya kantong komunitas, namun dengan kondisi relasi yang berbeda yaitu berkonflik dan damai.

Jaringan kewargaan dalam hidup keseharian masyarakat menunjukkan perbedaan relatif, karena perkembangan masyarakat yang berbeda. Yogyakarta sebagai bagian dari pekotaan lebih bersifat urban dibandingkan dengan ketiga lokasi yang lain. Apalagi jika melihat lokasi KISK di ketiga daerah yang lain tersebut berada di daerah semi urban yaitu: Manislor (Kuningan), Omben dan Karangpenang (Sampang), dan Romanglampoa (Gowa). Masyarakat Yogyakarta meskipun lebih urban, namun intimitas interaksi tidak menjadi hilang, sebab dalam banyak hal sifat-sifat guyub masih ditemukan. Hubungan-hubungan ketetanggaan dan pertemanan masih berkembang, apalagi kunjungan dan hubungan kekerabatan. Bahkan perkawinan antar tetangga, daerah, suku, dan paham agama masih sering ditemukan.

Di samping itu, pada saat hari raya agama dan menjelang ramadhan, orang-orang yang berbeda paham agama masih melakukan kegiatan bersama dan bersilaturahmi antara satu dengan yang lain. Hal yang sama ditemukan di ketiga daerah yang lain.

Penyebab Bentuk Relasi

Penyebab perbedaan bentuk relasi sosial (konflik atau harmoni)

antarkomunal Islam di suatu daerah meskipun sama-sama ada KISK-nya karena ada tiga (3) faktor besar yaitu:

Pertama, berkembang-tidaknya religiosentrisme antarpihak yang disertai dengan berkembang-tidaknya toleransi, terutama dari pihak mayoritas. Religiosentrisme adalah sebuah pandangan yang melihat paham kelompok Islam lain secara negatif karena berdasarkan standar dan klaim kebenaran dari paham agamanya sendiri, sehingga melahirkan stereotip negatif. Di satu pihak terjadi stereotip sesat formal, dan sesat publik terhadap KISK, di pihak lain ada pengkafiran dari KISK terhadap KIM.

Hal ini mengandaikan bahwa walaupun religiosentrisme atau stereotip negatif berkembang, namun jika sikap toleransi berkembang maka konflik kekerasan dan gerakan masif tidak akan ada, begitu juga sebaliknya. Hal ini terlihat dalam kasus Ahmadiyah di Yogyakarta, dan dalam batas-batas tertentu An-Nadzir di Gowa. Sementara dalam kasus Ahmadiyah di Kuningan dan Syiah di Sampang stereotip negatif yang berkembang diiringi melemahnya toleransi, sehingga muncul konflik. Lemah dan kuatnya toleransi tersebut terkait dengan faktor-faktor lain, baik yang berasal dari struktur yang ada dalam masyarakat maupun tindakan-tindakan yang dilakukan berbagai pihak.

Kedua, tindakan-tindakan yang dilakukan setiap kelompok dalam berelasi dengan kelompok lain, baik oleh negara, kelompok masyarakat sipil, dan tindakan agensi dari KISK sendiri. Tindakan-tindakan berbagai pihak tersebut selain telah menyebabkan terjadinya konflik juga menyebabkan integrasi. *Ketiga*, struktur sosial yang menjadi daya paksa bagi kelompok seperti posisi tokoh lokal, paham agama, kantong komunitas, sejarah relasi, dan jaringan relasi. Faktor-

faktor tersebut tidak berdiri sendiri, namun saling berkelindan.

Penyebab Harmoni

Penyebab harmoni di Gowa dapat dilihat pada faktor internal atau keagenan dari KISK, yaitu pemahaman keagamaan KISK yang tidak mengkafirkan KIM dan kelompok Islam yang lain. Faktor agensi yang lain karena adanya komitmen KISK untuk menjadi sumber perdamaian dan kerukunan dalam masyarakat, kemampuan bersosialisasi dengan masyarakat dan pencitraan yang baik melalui kegiatan sosial, dan dakwah bilhal kepada masyarakat, serta kemampuan beradaptasi dengan masyarakat sekitar sehingga terjadi mutualis-simbiosisme.

Adapun faktor eksternal selain karena belum adanya stereotip sesat secara kolektif dan formal dari KIM. Kasus Gowa sekaligus menunjukkan kuatnya otoritas dan peran lembaga konsul seperti MUI dalam menentukan kriteria stereotip-sesat, sekaligus mempengaruhi tindakan kelompok lain dalam menghadapi KISK. Karena itu, meskipun ada KIM yang beresistensi terhadap KISK, namun tidak melahirkan konflik masif dan kekerasan.

Tindakan aparat negara dalam bentuk dukungan simbolik menjadi salah satu penyebab (eksternal) kedamaian di Gowa dan tidak adanya konflik terhadap KISK. Dukungan simbolik aparat lokal terhadap KISK terlihat dari kunjungan dan pemberian penghargaan terhadap warga KISK di bidang sosial-ekonomi.

Sedangkan di Yogyakarta, faktor penting tidak terjadinya konflik masif dan kekerasan karena sikap dan kebijakan multikulturalisme elite budaya-politik. Politik multikulturalisme telah berdampak terhadap berkembangnya toleransi dari kelompok sipil dan aparat negara. Faktor lain yaitu tidak adanya kantong komunitas KISK. Selain itu,

eksklusivitas KISK (JAI) dalam relasi keseharian serta tidak dilibatkannya KISK dalam lembaga konsul tetap menjadi faktor potensial terjadinya kecemburuan dan konflik interkomunal Islam. Selain itu, ada beberapa yang mengganjal dalam konteks Yogya yaitu berkembangnya generalisasi dari masyarakat dan aparat pemerintah sendiri terhadap dua KISK (GAI dan JAI). Hal ini akibat dari belum adanya kesatuan persepsi di lingkungan pejabat internal pemerintah, dan belum adanya kesatuan pandang dalam penentuan kriteria kesesatan suatu kelompok antara negara dan lembaga konsul Islam (MUI).

Penyebab Konflik

Sementara di Sampang terjadinya konflik karena kegagalan negosiasi antarpihak, perebutan basis otoritas dan legitimasi antar elite agama, dan persaingan internal keluarga. Kegagalan negosiasi dan perebutan otoritas serta legitimasi menunjukkan bahwa setiap kelompok, KISK dan KIM, sama-sama melakukan tindakan agensi atau sama-sama menjalankan kuasa dan berkontestasi.

Di dalam proses penjalanan kuasa atau agensi tersebut, setiap pihak berstrategi dan berjuang untuk menggapai kepentingan masing-masing. Dalam perjuangan tersebut pasti ada salah satu pihak yang unggul atau mendominasi. Bagi yang unggul dia akan terus berusaha mempertahankan keunggulannya, sedangkan bagi yang terdominasi tetap berusaha bertahan, dan suatu saat akan membalikan keadaan. Kecenderungan ini mirip dengan pandangan Bourdieu yang menyatakan bahwa, individu dan kelompok sebagai sosok kreatif dan dalam relasi sosialnya dapat mempengaruhi dan sekaligus dipengaruhi struktur yang ada. Para pelaku selain aktif yang bebas,

mereka juga dibatasi oleh habitus-habitus lain yang menjadi struktur, artinya ada relasi timbal balik antara tindakan agen dengan struktur. Tindakan yang dilahirkan dari habitus, juga memberikan kemungkinan adanya resistensi, sehingga ekspresi kebebasan bertindak pelaku bukan hanya berupa resistensi namun juga berupa akomodasi.

Selain itu ada dua kecenderungan yang menarik dalam kasus Sampang yaitu: (1) Konflik KISK dan KIM di Sampang tersebut semakin menguat ketika KIM mampu melakukan kolaborasi dengan elite politik lokal dan regional, dan bahkan dalam batas-batas tertentu pada level nasional. Kemampuan elite KIM mempengaruhi elite politik sekaligus menunjukkan dominasinya terhadap elite politik sekaligus memberikan bukti bahwa mereka masih memiliki posisi penting dalam struktur masyarakat Madura. Kemampuan mempengaruhi elite politik dan strategi kolaborasi telah menjadikan KIM dominan dalam dinamika konfliknya dengan KISK. (2) Di sisi lain, isu KISK sebenarnya telah melahirkan kontestasi internal elite KIM sendiri. Isu KISK dijadikan sarana merebut opini publik untuk tercapainya kepentingan politik di kalangan sebagian elite KIM. Sebagaimana diketahui bahwa afiliasi politik elite KIM di Sampang cukup beragam, dan hal ini nampak juga ketika Pemilu pada tahun 2012 yang lalu. (3) Konflik di Sampang juga dipicu oleh kontestasi internal dalam keluarga atau elite KISK sendiri, sehingga menjadikan konfliknya lebih kompleks dan mendalam. Di dalamnya terkandung pertahanan *harga diri* yang didasarkan atas budaya setempat.

Kecuali faktor keluarga, beberapa faktor yang terdapat di Sampang tersebut terdapat juga di Kuningan, terutama adanya kolaborasi antara elite KIM dan elite politik.

Posisi Negara dan Masyarakat Sipil

Dalam menghadapi kasus KISK ada dua kekuatan besar yang bermain, setiap pihak menjalankan tindakan atau kekuasaan, yaitu masyarakat sipil dan negara. Kekuatan masyarakat sipil terpola ke dalam dua kelompok yaitu kekuatan sipil antiKISK (KIM dan KISU) dan kekuatan sipil antidiskriminasi dan pegiat HAM. Negara dan kekuatan sipil antiKISK selalu berkolaborasi dalam menghadapi KISK, sedangkan kekuatan sipil antidiskriminasi mendukung KISK.

Posisi KISK di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh persepsi, sikap dan regulasi yang dilakukan negara dan kekuatan masyarakat sipil anti KISK pada level nasional, walaupun mungkin sebuah KISK lokal berposisi mayoritas.

Tindakan-tindakan yang dilakukan negara berupa *regulasi* atau pengaturan melalui kebijakan, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Negara juga tidak memasukkannya sebagai lembaga konsil, dan bahkan menafikan sebagian hak-hak sipil warga KISK. Ketika terjadi proses konflik, kekuatan sipil antiKISK membagi peran (*sharing role*) meskipun sering juga berpadu. Mereka ada yang bermain melalui pada level konflik ide seperti penyebaran stereotip sesat, dan fatwa ataupun keputusan, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Selain itu ada yang berperan sebagai pelaku konflik masif dan kekerasan.

Agensi KISK

Agensi yang dilakukan oleh KISK lebih sebagai upaya mempertahankan diri (Ahmadiyah dan Syiah) dan upaya pelanggaran relasi dan kondisi yang sudah ada (*status quo relasi*) melalui berbagai tindakan. Tindakan mempertahankan diri dilakukan melalui permainan dan pembalikan wacana, resistensi diam dan aktif, negosiasi baik

pada tingkat lokal maupun nasional, membangun aliansi dan jejaring dengan kekuatan sipil antidiskriminasi, bahkan mengakomodasi tuntutan masyarakat. Adapun pelanggaran *status quo relasi* (dalam kasus An-Nadzir) berupa pengembangan peran dalam kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Refleksi

Dari uraian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: *Pertama*, Struktur sosial yang banyak berpengaruh atau terkait dengan bentuk relasi sosial KISK dan kelompok di luar dirinya meliputi budaya lokal yang terkait dengan nilai-nilai kerukunan dan posisi tokoh dalam struktur sosial masyarakat, paham agama mayoritas yang berkembang dalam masyarakat, sejarah relasi sosial dalam masyarakat, dan lokasi tiap kelompok agama khususnya mengenai ada tidaknya kantong-kantong komunitas, dan jaringan relasi. *Kedua*, penyebab perbedaan bentuk relasi sosial (konflik atau harmoni) intrakomunal Islam di suatu daerah meskipun sama-sama ada KISK-nya karena ada tiga (3) faktor yang saling berkelindan, yaitu: (1) berkembang-tidaknya religiosentrisme antarpihak yang disertai dengan berkembang-tidaknya toleransi, terutama dari pihak mayoritas. (2) tindakan-tindakan yang dilakukan setiap kelompok dalam berelasi dengan kelompok lain, baik oleh negara, kelompok masyarakat sipil, dan tindakan agensi dari KISK sendiri. (3) struktur sosial yang menjadi daya paksa bagi kelompok seperti posisi tokoh lokal, paham agama, kantong komunitas, sejarah relasi, dan jaringan relasi. *Ketiga*, dalam menghadapi kasus KISK masyarakat sipil terpola ke dalam dua kelompok yaitu kekuatan sipil antiKISK (KIM dan KISU) dan kekuatan sipil anti-diskriminasi dan pegiat HAM. Negara dan kekuatan sipil anti-KISK selalu berkolaborasi dalam

menghadapi KISK, sedangkan kekuatan sipil antidiskriminasi mendukung KISK. Sementara itu, KISK yang berkonflik menjalankan agensi sebagai upaya mempertahankan diri, baik melalui pembalikan wacana, resistensi diam dan aktif, negosiasi baik pada tingkat lokal maupun nasional, membangun aliansi dan jejaring dengan kekuatan sipil antidiskriminasi, dan mengakomodasi kepentingan mayoritas. Adapun KISK yang tak berkonflik berupaya melanggengkan relasi dan kondisi yang sudah adadengan mengakomodasi tuntutan masyarakat, dan pengembangan peran diri dalam kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan, antara lain: (1) Mengingat penyebab terjadinya bentuk relasi sosial di lokasi tempat KISK berada karena multi faktor, maka dalam upaya pengembangan relasi sosial potitif perlu diperhatikan beberapa faktor yang saling berkelindan tersebut. Secara garis besar dapat

difokuskan kepada: (a) minimalisasi stereotip dan pengembangan nilai lokal mengenai keharmonisan, (b) mengevaluasi secara cermat tindakan-tindakan yang dilakukan setiap kelompok yang ikut memicu konflik dan damai, termasuk aparat negara sendiri. (c) mencermati aspek-aspek struktur sosial yang ikut memberikan pengaruh terhadap terciptanya konflik dan damai. (2) Pemerintah perlu melakukan sosialisasi informasi mengenai perbedaan profil dan paham keagamaan GAI dan JAI, baik kepada masyarakat Islam maupun kepada pejabat pemerintah daerah sendiri. (3) Selain itu pemerintah juga perlu mengimplementasikan isi SKB 3 Menteri secara adil dan komprehensif, baik mengenai larangan dan pengawasan kegiatan Ahmadiyah (JAI) maupun pengawasan terhadap tindakan masyarakat Islam yang mengarah kepada penafian kerukunan dan toleransi. Juga perlu sinkronisasi antara isi SKB 3 Menteri dengan fatwa MUI tahun 2005, khususnya mengenai kelompok sasarannya dan kriteria sesat.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik. 'Integritas Nasional, Globalisasi, dan Kearifan Lokal,' dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*. No. 65/2001.
- Abidin, Andi Zainal. *Sejarah Sulawesi Selatan*. Makassar: Hasanuddin University Press, 1999.
- Abidin, Zaenal. 'Tindak Anarkhis terhadap Kelompok Salafi di Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.' Dalam *Jurnal Harmoni*, Vol. VIII, No. 31, Juli-September 2009
- Abu Lughat, Lila. *Writing Women Worlds, Bedouin Stories*. Contemporary Debates. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
- Ahimsah, Heddy Shri. *Minawang Hubungan Patron Klien di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998
- Badan Pusat Statistik (BPS) Gowa. *Gowa Dalam Angka*. Gowa: BPS, 2012.
- Burhanuddin, Asep. *Ghulam Ahmad Jihad Tanpa Kekerasan*. Yogyakarta: LKiS 2005.

- Bogdan, Robert C & Biklen, Sari Knopp. *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Method*. Boston: Allyn & Bacon, Inc, 1982.
- Bourdieu P. *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- Blumer, Herbert. *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. Englewood Cliffs. N.J: Prentice Hall, 1969.
- Connolly, Petter. *Approaches to the study of Religion*. Terjemahan Aeka, *Pendekatan Sosiologi Agama*. Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approachs*. London: Sage Publications, 1994.
- Foucault, M. *Power/Knowledge*. New York: Tantheon, 1980.
- Gatra, *Edisi Khusus*. No. 02-03 Tahun X, 6 Desember 2003
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books Inc.Publisher, 1973.
- . *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Terjemahan Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jaya, 1989
- Hamid, Abdullah. *Andi Pangerang Petta Rani Profil Pemimpin yang Manunggal Dengan Rakyat*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana Indonesia, 1991.
- . *Manusia Bugis-Makassar*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1985.
- Hamilton, Peter (edit.). *Talcott Parsons dan Pemikirannya*. Terjamahan Hartono H. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Hefner, Robert W. *Hindu Javanese. Tengger Tradition and Islam*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hidayat, Ainurrahman. 2009. 'Karakter Orang Madura dan Filsafat Politik Lokal', dalam *Jurnal KARSA*. Volume XV. No.1. April 2009.
- Islamy. *Desain Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: P3KS Depsos RI, 2005.
- Ismail, Nawari. *Konflik Umat Beragama dan Budaya Lokal*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- . *Budaya Lokal sebagai Modal dalam Pengembangan Kerukunan Umat Beragama*, *Jurnal Mukaddimah*, Vol. XIV. No. 24 Januari-Juni 2008.
- . 'Profil Konflik Umat Beragama Studi Kasus di Lima Daerah'. dalam *Jurnal Mukaddimah*, No. 20 Tahun XII/ 2006.
- . 'Lembaga Sosial Berorientasi Keluarga dalam Penciptaan Perdamaian Berbasis Ketahanan Sosial,' Laporan Penelitian, Jakarta: DP2M Kementerian Pendidikan.
- Koentjaraningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat, 1985.
- Lincoln, Yvonna S., & Guba, Egon G. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: Sage Publications, 1985.
- Majelis Ulama Indonesia. t.th. *Mengawal Aqidah Umal; Fatwa MUI tentang Aliran-aliran Sesat di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI.

- Mansur. *Pelarangan Pencatatan Pernikahan Bagi Jema'at Ahmadiyah Kuningan*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- Mahmud, A. Hasan. *Lontara*. Makasar: Silasa, 1976
- Masri, Abd. Rasyid. *Perilaku Sosial Komunitas Jamaah An-Nadzir*. Hasil penelitian tidak terpublikasi. Makassar: Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, 2010
- Mead, George Herbert. *Mind, Self and Society* (edit. Charle W.Morris). Chicago: University of Chicago Press, 1934.
- Moh. Sulhan dan kawan-kawan. *Mencari Akar-akar Diskriminasi Minoritas untuk Memantapkan Pluralisme Agama; Penelitian tentang Kekerasan Ahmadiyah di Kuningan*. Cirebon: P3M STAIN Cirebon, 2005.
- Muchtarom, Zaini. *Santri dan Abangan di Jawa*. Jakarta: INIS, 1988
- Nash, June. "Introduction: Social movements and global processes", dalam June Nash (ed). *Social movements an antropological reader*. USA, UK, Australia: Blackwell Publishing, 2005.
- Nogi, Hesel. *Kebijakan Publik yang Membumi: Konsep, Strategi & Kasus Hukum*. Yogyakarta: Lukman Offset, 2003.
- Ripai, Ahmad. *Executive Summary Hasil Penelitian Kompetitif Kehidupan Keagamaan Puslitbang Kehidupan Keagamaan*. Jakarta: Balitbang Kementerian Agama, 2010.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. *Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Salehuddin, Ahmad. *Satu Dusun Tiga Masjid*. Yogyakarta: Pilar Media, 2007
- Sewang, Ahmad. 'Empat Abad Islam di Sulawesi Selatan'. Makalah Seminar Internasional dan Festival Kebudayaan, Pusat Kajian Islam PKP Unhas dan Pemkot Makassar, 5-7 September 2007.
- Setyadi, Elly M., Kolip, Usman. *Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Praktik, dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Syaukani, Imam. 'Konflik Sunni-Syiah di Bondowoso,' dalam *Jurnal Harmoni*. Vol. VIII, No. 31, Juli-September 2009
- Sunyoto, Agus. 1991. dalam *Prospek*, Edisi 10 Nopember 1991.
- Taylor, Steven J. & Bogdan, Robert. *Introduction to Qualitative Research Methods The Search for Meanings*. New York: A Wiley-Interscience Publication, 1984.
- Varshney, Ashutosh. *Konflik Etnis dan Peran Masyarakat Sipil*. Penerjemah Siti Aisyah dkk. Jakarta: Balitbang Agama Jakarta, 2009.
- Weber, Max. *Sosial Anction and tehe Types*. dalam Talcott Parsons et.al.edit. 1961. *Theories of Society*. New York: The Free Press, 1961.
- Zubairi, A. Dardiri. *Rahasia Perempuan Madura*. Esai-esai Remeh Seputar Kebudayaan Madura. Surabaya. Andhep Asor bekerja sama dengan Al-Afkar Press, 2013.
- Zulkarnain, Iskandar. *Gerakan Ahmadiyah di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2005.